

## **ATI KAREP BONDO CUPET: STUDI ETNOGRAFI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SAMBIGEDE KABUPATEN MALANG**

**(ATI KAREP BONDO CUPET: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF FREE HOUSING ASSISTANCE PROGRAM IMPLEMENTATION IN SAMBIGEDE VILLAGE, MALANG, INDONESIA)**

**Ifan Andriado\*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: Ifanandriado22@gmail.com

\* SMA Negeri 2 Malang, Jl. Laksamana Martadinata 84 Malang, Jawa Timur, 65118, Indonesia

Diterima: 28-04-2022, dipublikasikan 30-04-2022

### **Abstract**

Poverty is a big problem that needs to be solved in Malang Regency. One form of poverty experienced by the community is the quality of housing/houses. Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is one of the government assistance programs for Low-Income Communities (MBR) to encourage self-reliance in improving the quality of houses and building new homes. The aims of this research are to describe the implementation of the Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program and to describe the impact of the Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Sambigede Village, Sumberpucung District, Malang Regency. This study uses a qualitative method with a realist ethnographic approach. The techniques used in collecting data are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, reduction, presentation, and conclusion. The research subjects consisted of eleven informants determined using purposive and snowball sampling techniques. At the same time, the theory used in this study is the theory of rational choice by James S. Coleman. The results of this study are the implementation of the BSPS program in Sambigede village is based on the rationale of the goals of the recipient community, which are considered rational, including maximizing the existence of assistance by taking advantage of opportunities to become BSPS recipients, people's desire to live independently, and the desire of the community to improve the quality of housing. Meanwhile, the impact felt by the community receiving the BSPS after the program was implemented, namely the emergence of a debt burden that was borne. The rationality in debt is based on two causes, namely internal and external causes. The internal causes include the desire to own a house, self-help limitations, building homes on the provisions and suggestions of the DPKPCK service. External causes, among others are the system for leveling the types of aid materials by the village government and the policy of dealer shops which are deemed detrimental, and the duration of development time is considered quite short.

**Keywords:** BSPS program; qualitative method; Sambigede Village

### **Abstrak**

Kemiskinan menjadi masalah besar yang perlu diselesaikan di Kabupaten Malang. Salah satu bentuk kemiskinan yang dialami masyarakat adalah kualitas hunian/rumah. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu program bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan untuk mendeskripsikan dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan etnografi realis. Teknik yang digunakan dalam

mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian terdiri dari sebelas informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pilihan rasional oleh James S. Coleman. Hasil penelitian ini yaitu implementasi program BSPS di desa Sambigede didasarkan atas tujuan masyarakat penerima bantuan yang dianggap rasional, antara lain: memaksimalkan keberadaan bantuan dengan memanfaatkan peluang menjadi penerima BSPS, keinginan masyarakat untuk hidup mandiri, dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hunian. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat penerima BSPS pasca pelaksanaan program yaitu munculnya beban hutang yang ditanggung. Adapun rasionalitas dalam berhutang didasarkan pada dua penyebab yaitu penyebab internal dan eksternal. Penyebab internal tersebut antara lain besarnya keinginan untuk memiliki rumah, keterbatasan swadaya, dan membangun rumah di atas ketentuan dan saran dinas DPKPCK. Penyebab eksternal, antara lain sistem penyamarataan jenis material bantuan oleh pemerintah desa dan kebijakan toko penyalur yang dirasa merugikan serta durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek.

**Kata kunci:** program BSPS; metode kualitatif; Desa Sambigede

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi salah satu bentuk masalah sosial yang dihadapi oleh banyak negara. Kondisi ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh alat pemuas kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya dalam wujud uang atau materi, tetapi kemudahan seseorang atau sekelompok orang dalam mengakses sandang, pangan, papan, dan pendidikan pun menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Namun, Yulifar (2016) menyatakan bahwa kebutuhan manusia bukanlah hanya pangan, sandang, dan papan saja, melainkan terdapat tiga kategori yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih. Tiga kebutuhan inilah yang memantik perhatian baik bagi seseorang pemilik kebutuhan tersebut maupun pemerintah sebagai aktor pemegang kendali pembangunan berkelanjutan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berjuang mengentaskan angka kemiskinan melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan dalam periode September 2017-Maret 2018 yang ditunjukkan oleh data statistik persentase penduduk miskin Indonesia. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 633,2 ribu orang dari yang awalnya kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%) menjadi sebesar 25,95 juta orang (9,82%) pada bulan Maret 2018. Lebih spesifik lagi, selama periode September 2017-Maret 2018 angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2017 sebesar 10,27 juta orang atau dengan persentase 7,26 %, mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi sebesar 10,14 juta orang atau dengan persentase 7,02%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2017 sebesar 16,31 juta orang atau dengan persentase 13,47%, juga mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi sebesar 15,81 juta orang atau dengan persentase 13,20% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).

Dari penurunan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya telah membuktikan jika pada dasarnya masalah kemiskinan tersebut dapat diatasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah pembangunan berkelanjutan. Menurut Mukhlis (2009), pembangunan adalah proses perubahan multidimensional yang terjadi pada struktur sosial, sikap hidup, dan kelembagaan masyarakat. Di sisi lain, pembangunan juga menitikberatkan pada perubahan ekonomi seperti pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kualitas kesehatan, dan pendidikan masyarakat, serta pengentasan angka

kemiskinan. Hal inilah yang menuntut Indonesia bergerak untuk mengentaskan masalah sosial yang dihadapinya selama ini. Bentuk upaya yang dilakukan Indonesia adalah menciptakan berbagai macam kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan permukiman masyarakat. Salah satu kebijakan yang berupaya mengentaskan kemiskinan dan permukiman masyarakat dapat dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah program bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Maka secara substansial, BSPS merupakan bantuan dari pemerintah yang berfokus pada pembenahan dan perbaikan tempat singgah dalam mewujudkan rumah layak huni. Terdapat dua jenis BSPS yaitu PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) dan PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya). Program yang berfokus pada kemiskinan dan permukiman masyarakat ini, sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2011. Namun, kebijakan ini telah mengalami enam kali revisi, hingga dikeluarkan program yang dirasa sesuai untuk mengentaskan kemiskinan yaitu BSPS.

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran pelaksanaan BSPS. Pada tahun 2018, terdapat dua desa di Kabupaten Malang yang mendapat BSPS jenis PBRS. Dua desa tersebut yaitu Desa Sambigede dan Desa Jatiguwi. Desa Sambigede merupakan salah satu desa yang telah menjadi sasaran BSPS. Desa ini berada di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baru berjalan satu periode di desa ini. Terdapat 43 Kepala Keluarga (KK) yang mendapat BSPS jenis PBRS dalam periode awal tersebut. Dari jumlah penerima yang tergolong besar dalam sebuah desa, hal tersebut membuktikan jika partisipasi masyarakat terhadap program sangat tinggi. Pada dasarnya, program BSPS ini muncul untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya melalui pembangunan rumah layak huni berbasis pemberdayaan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu dari bidang hunian, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pintu keluar dari masalah kemiskinan. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang bisa diselesaikan apabila masyarakat selalu mendukung upaya pemerintah dengan menjadikan pribadi masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Namun, hasil dari program ini sangatlah di luar dugaan, program yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong tingkat keswadayaan masyarakat akan perbaikan kualitas hunian, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat penerima bantuan tersebut. Program yang pada akhirnya diharapkan dapat menuntun masyarakat keluar dari katup kemiskinan di sisi lain tidak dapat dipungkiri juga membelenggu masyarakat untuk jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin dalam, khususnya dirasakan oleh masyarakat yang belum siap mengikuti program, baik siap secara kemampuan mendirikan rumah, maupun kemampuan untuk berswadaya dalam bentuk uang dan material bangunan (memiliki swadaya yang pas-pasan). Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti melalui lima keluarga selaku penerima BSPS yang memiliki swadaya terbatas, menyatakan bahwa akibat terbatasnya jumlah swadaya yang membuat mereka jatuh dan terjerat banyak hutang.

Ketidakkampuan penerima bantuan dalam menyesuaikan jumlah swadaya yang dimiliki dengan kebutuhan rumah yang akan dibangun mendorong seseorang untuk berhutang. Hal tersebut dikarenakan kurang matangnya perencanaan kegiatan oleh penerima bantuan yang menimbulkan banyak kebutuhan tak terduga muncul di tengah-tengah proses pembangunan. Bermodalkan keinginan untuk memiliki rumah tanpa mencoba melihat kemampuan swadaya yang dimilikinya, membuat penerima bantuan mengalami kesulitan dalam menjalankan program BSPS yang berujung pada munculnya berbagai dampak seperti beban hutang yang harus dipikul

oleh penerima bantuan pasca pelaksanaan program. Tentunya, hal itu dirasa sangat memberatkan bagi penerima bantuan yang memiliki modal swadaya sedikit, terlebih pencairan dana bantuan akan dicairkan setelah target yang telah ditentukan terpenuhi. Dari sinilah peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi program BSPS harus diimbangi dengan kesanggupan masyarakat dalam berswadaya seperti halnya syarat mengikuti program BPS itu sendiri. Jadi, masyarakat penerima bantuan harus benar-benar siap sebelum memutuskan mengikuti program, baik siap secara kemampuan mendirikan rumah, maupun kemampuan untuk berswadaya dalam bentuk uang dan material atau bahan bangunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seperti yang dilakukan oleh Arizona, Nugroho, dan Rahmawati (2015); Isabella, Sesar, dan Amaliatulwalidain (2019); Rusli dan Inggriani (2015); Wibowo dan Santoso (2018) hanya melihat BSPS dari kacamata evaluasi penerapan program BSPS itu sendiri. Mereka sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih belum berjalan sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki seperti lemahnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia dalam pembangunan rumah, dan kurangnya rasa gotong-royong masyarakat sehingga masih ada beberapa masyarakat yang mengerjakan pembangunan rumah sendiri. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hariyani (2018); Qomaria (2015); Togatorop (2014), hanya melihat BSPS dari kacamata dampak yang ditimbulkan dari penerapan program BSPS itu sendiri. Mereka sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menimbulkan dampak bagi berbagai aspek kehidupan, antara lain dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang spesifik membahas tentang studi etnografi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sejauh ini belum ada penelitian yang mendalami keluarga penerima bantuan dan dampak dari pelaksanaan program BSPS, salah satunya adalah hutang. Sisi kebaharuan penelitian (*novelty*) diperoleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan etnografi, diharapkan mampu masuk ke dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan BSPS lebih dalam, sehingga didapatkan sebuah data murni yang berasal dari kacamata masyarakat penerima bantuan (perspektif emik) terhadap implementasi bantuan BSPS itu sendiri. Penggalan data penelitian juga menunjukkan sisi urgensi dalam sebuah penelitian ini, yaitu bahwa keberadaan program bantuan ini menciptakan berbagai kesulitan bagi penerima bantuan BSPS itu sendiri khususnya oleh penerima bantuan yang memiliki swadaya terbatas. Kesulitan yang dihadapi dikarenakan adanya ketidakmampuan penerima BSPS dalam menyetarakan keinginan membangun rumah dengan kesanggupan berswadaya yang dimilikinya. Berdasarkan penggalan data dari kelima keluarga yang dijadikan informan penelitian, mereka sepakat menyatakan bahwa kesulitan tersebut diatasi dengan cara berhutang kepada saudara terdekat. Alhasil, mereka harus terjerat beban hutang pasca pelaksanaan program hingga sekarang. Padahal, kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya terjadi akibat diciptakannya sebuah kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penerima kebijakan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Purnawati (2014), kebijakan publik adalah tindakan yang saling berhubungan dan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara tujuan program bantuan BSPS dengan realita hasil implementasi yang telah berjalan dari kacamata murni penerima bantuan BSPS khususnya penerima bantuan yang memiliki swadaya terbatas. Dalam istilah lokal mereka menyebutnya "*Ati Karep Bondo Cupe*" yang memiliki makna besar harapan namun hanya memiliki dana/uang yang terbatas. Kondisi inilah yang menjadi penting (*urgent*) dan menarik untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan

mendeskripsikan dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan etnografi realis. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan agar peneliti mampu menguak lebih dalam kehidupan para informan (Moleong, 2021). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan pengamatan pra-penelitian dengan mengobservasi hasil program BSPS. Kemudian, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Staf Dinas Perumahan serta Pendamping BSPS dari Aparat Pemerintah Desa. Penelitian dilanjutkan dengan menggali informasi hasil program BSPS dengan mewawancarai lima anggota keluarga penerima program, dan dilanjutkan verifikasi data melalui wawancara pemilik toko penyalur bantuan BSPS. Data hasil wawancara diperkuat dengan dokumen yang peneliti gunakan selama proses pengumpulan data seperti SOP pelaksanaan BSPS, data penerima BSPS desa Sambigede, dan berbagai literasi pendukung lainnya seperti buku, jurnal, tesis, dan disertasi seputar implementasi BSPS. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian terdiri dari sebelas informan (pihak Dinas Perumahan/DPKPCK Kabupaten Malang, pendamping BSPS dari Aparat Desa, Ketua RT, lima keluarga penerima BSPS, dan toko penyalur BSPS) yang ditentukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Adapun pemilihan kesebelas informan di atas tidak lain karena keterlibatan mereka secara langsung dalam proses pelaksanaan program BSPS. Pihak Dinas Perumahan terlibat menjadi informan karena pihak inilah yang mengetahui secara detail SOP dan peraturan akan pelaksanaan program. Aparat pemerintah desa terlibat menjadi informan karena pihak ini yang menjadi pendamping dari sebelum sampai terlaksananya program BSPS. Ketua RT 5 terlibat menjadi informan karena sangat peka dan mengetahui berbagai data baru pendukung penelitian. Lima keluarga penerima bantuan terpilih menjadi informan kunci karena lima keluarga ini yang terjerat banyak hutang pasca pelaksanaan program. Adapun toko penyalur terlibat menjadi informan karena pihak ini yang menentukan harga sekaligus penyalur bahan bantuan dalam bentuk material bangunan selama pelaksanaan BSPS. Dari banyaknya fakta yang didapatkan, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori pilihan rasional oleh James S. Coleman sebagai pisau analisis penelitian ini. Penggunaan teori ini dianggap mampu menguak fakta hasil penelitian seputar pelaksanaan BSPS di Desa Sambigede.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman**

Program BSPS jenis PBRS baru berjalan satu kali di desa Sambigede yaitu pada tahun 2018. Jumlah penerima BSPS di desa ini mencapai 43 KK pada tahun 2018. Jumlah yang tergolong besar pada sebuah desa penerima bantuan di tahun itu. Hal itu dibuktikan dari Data Pokok BSPS Dinas Perumahan (DPKPCK) Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa hanya terdapat dua penerima BSPS jenis PBRS di tahun 2018 di Kabupaten Malang, yaitu desa Sambigede dan Jatiguwi. Jumlah KK penerima bantuan BSPS di desa Sambigede jauh lebih besar yaitu 43 KK dibandingkan dengan desa Jatiguwi yang berjumlah 21 KK. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah KK di desa Sambigede pada tahun 2018, yaitu sebanyak 1.739 KK. Dari ribuan ribuan KK tersebut, memang sebagian dari masyarakat belum memiliki rumah atau hunian, sehingga tidak heran jika di desa ini memiliki jumlah penerima BSPS yang tergolong besar. Penerima bantuan BSPS di desa Sambigede disebut juga dengan KPB (Kelompok Penerima Bantuan), hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018. Berdasarkan hasil paparan data yang telah dikemukakan, peneliti mencoba menganalisis hasil penelitian menggunakan kaca mata teori pilihan rasional oleh James S. Coleman, di mana dalam pilihan rasional terdapat dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Berikut penjelasan detail terkait dua konsep tersebut:

### **Implementasi BPS di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu/aktor untuk melakukan suatu tindakan atas dasar tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nilai atau pilihan (preferensi). Di sisi lain, Coleman juga membutuhkan aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi pada pengembangan teorinya. Ia menyatakan bahwa aktor memilih tindakan yang dilakukan tidak lain karena dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dilihat sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Hal ini berarti adanya upaya yang dilakukan aktor dalam mencapai preferensi yang telah ditetapkannya selama bertindak tersebut. Aktor pun dipandang memiliki nilai atau pilihan, yang berujung pada pemilihan upaya yang disejajarkan dengan nilai atau tujuan yang ditetapkan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan aktor dan dari mana sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah adanya kenyataan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar untuk mencapai tujuan sesuai dengan preferensi aktor (Upe, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, aktor yang dimaksud pada kaca mata teori pilihan rasional yaitu para penerima bantuan BPS. Hal ini berarti penerima bantuan BPS memiliki peran sentral terhadap pelaksanaan program BPS. Masyarakat penerima bantuan memutuskan untuk mengikuti program BPS tidak lain adalah memiliki tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Tujuan masyarakat penerima bantuan memilih tindakan yang dilakukan tidak lain ditujukan supaya dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka. Peneliti berhasil menghimpun tiga tujuan atau maksud masyarakat mengikuti dan mendaftar sebagai penerima bantuan BPS, yaitu:

#### ***Memaksimalkan Keberadaan Bantuan dengan Memanfaatkan Peluang Menjadi Penerima Bantuan BPS***

Pada dasarnya masyarakat mengikuti program bantuan BPS ini atas dasar memaksimalkan keberadaan program BPS. Maksud dari pernyataan ini yaitu pada awalnya mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya program ini di desa Sambigede. Bahkan sebagian dari mereka mengetahuinya dari perangkat desa yang sengaja menyosialisasikan program melalui rumah yang telah dibidik. Bahkan juga ada yang mendapatkan informasi akan program ini dari saudara terdekat ataupun tetangga. Mereka menganggap bahwa program ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan primer akan hunian. Tanpa berpikir panjang, sebagian mereka langsung memutuskan untuk mendaftar bantuan BPS ini. Bahkan terdapat dari mereka yang menyatakan alasan mengikuti program ini dikarenakan mumpung terdapat bantuan yang belum tentu ada lagi di kemudian hari. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jepri yang menganggap bahwa program ini seperti halnya “duwet kutah” (uang tumpah). Ia menganggap bahwa keberadaan program ini harus dimanfaatkan, di samping ia memang belum mempunyai hunian, di sisi lain pun persyaratan mengikuti program BPS yang dianggap sangat mudah. Persyaratan tersebut antara lain persyaratan administratif seperti fotokopi KK, KTP, dan surat pajak tanah. Selain itu, mereka juga harus memiliki kesanggupan dalam berswadaya dan memiliki tanah matang yang berstatus sah. Pada dasarnya mayoritas dari informan memilih tindakan atau keputusan yang mereka ambil dianggap rasional dikarenakan adanya tujuan yang memang ingin dicapai dengan berbagai pertimbangan preferensi yang telah dipikirkan seperti ketidakpastian akan adanya program tersebut di kemudian hari dan menganggap bahwa program itu adalah program uang tumpah dari

pemerintah dikarenakan persyaratan mengikuti program BSPS yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti program BSPS sekalipun pada saat itu hanya memiliki swadaya yang sangat terbatas.

### ***Keinginan Masyarakat untuk Hidup Mandiri***

Program BSPS ditujukan kepada masyarakat untuk memperbaiki kualitas hunian baik dengan program PBRS (Pembangunan Baru) maupun PKRS (Peningkatan Kualitas). Jadi, bisa dikatakan mayoritas penerima bantuan BSPS di desa Sambigede adalah masyarakat yang sudah berkeluarga dan belum memiliki rumah hunian. Biasanya masyarakat tersebut sebelumnya masih hidup satu atap bersama keluarganya. Hal ini tergambar pada kehidupan informan Bapak Alek. Sebelum menerima bantuan ini ia dan keluarganya hidup satu atap dengan orang tua dan keluarga adik kandungnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam satu rumah terdapat tiga kepala keluarga. Begitu juga yang dialami oleh informan Bapak Jepri, Bapak Adi, dan Bapak Edi, di mana sebelumnya juga masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Hal inilah yang membuat masyarakat penerima bantuan tersebut memutuskan untuk mengikuti program BSPS dengan tujuan bisa hidup lebih mandiri lagi melalui bangunan rumah barunya. Keputusan untuk hidup mandiri dari kondisi sebelumnya dianggap keputusan yang rasional oleh mereka sehingga mereka yakin untuk mengikuti program BSPS pada saat itu sekalipun mereka hanya memiliki swadaya yang sangat terbatas.

### ***Keinginan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Hunian***

Memang sebagian masyarakat yang mengikuti program ini sebelumnya tidak memiliki rumah. Namun, ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi masih dalam kondisi yang tidak layak huni. Seperti yang terjadi pada informan Bapak Nyonyong. Kondisi hunian Bapak Nyonyong dan keluarga sebelumnya memang tidak layak huni. Rumahnya terbuat dari bambu. Bahkan menurut pengakuan Ibu Eka (Istri Bapak Nyonyong), terdapat beberapa dinding rumah yang bolong, beberapa genteng yang pecah sehingga banyak tetesan air masuk ke dalam rumah ketika musim hujan tiba. Memang dari awal mereka memiliki keinginan untuk membenahi rumahnya itu, tetapi karena kendala uang, mereka memilih untuk menampung air tersebut menggunakan wadah ketika hujan turun. Keberadaan BSPS ini mereka ketahui dari Pak Bayan yang sengaja datang ke rumahnya untuk menyosialisasikan program BSPS ini. Tanpa berpikir panjang mereka pun menerima tawaran tersebut sekalipun mereka hanya memiliki swadaya yang terbatas yaitu hanya uang sejumlah satu juta dan beberapa bahan bangunan seperti batu bata sebanyak lima ribu. Pilihan yang dianggap rasional yang mereka putuskan tercermin ketika mereka dengan yakin mengikuti program BSPS karena kualitas hunian sebelumnya yang tidak layak huni sekalipun pada waktu itu mereka memiliki swadaya yang sangat terbatas.

**Tabel 1. Pilihan atau Preferensi yang Dimiliki Aktor (Masyarakat Penerima Bantuan BSPS)**

Nomor Preferensi	Preferensi yang Dimiliki Oleh Masyarakat Penerima Bantuan
1.	Membangun rumah dengan menunggu program BSPS ada kembali di kemudian hari sembari mengumpulkan swadaya.
2.	Membangun rumah dengan cara menabung dan ketika memiliki kesiapan dalam berswadaya baik dari segi uang maupun barang pendukung.
3.	Mengikuti program BSPS meskipun dalam kondisi swadaya terbatas.

Dari ketiga pilihan (preferensi) pada Tabel 1 yang dimiliki masyarakat penerima bantuan tersebut, mereka dengan pasti memilih pilihan ke tiga sebagai bentuk tindakan untuk mewujudkan keinginan mereka dalam memiliki rumah hunian. Mereka menganggap pilihan atau preferensi nomor tiga memberi banyak keuntungan dari dua pilihan lainnya. Mereka menganggap bahwa membangun rumah dengan menunggu program BSPS ada kembali di kemudian hari adalah hal yang mustahil. Para penerima bantuan mengetahui jika program bantuan seperti ini

belum tentu ada setiap tahun bahkan belum bisa dipastikan akan ada lagi program yang sama di hari selanjutnya. Sekalipun memang ada, tetapi sangat kecil kemungkinan untuk terimplementasi kembali di desa yang sama. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa hadirnya program BSPS di desa Sambigede adalah wujud dhuwet kutah (uang tumpah) yang sengaja diberikan oleh pemerintah. Anggapan itu muncul ketika melihat besar nominal bantuan dan kemudahan masyarakat untuk mendaftar bantuan tersebut. Kemudahan akses dalam mendaftar sebagai calon penerima bantuan BSPS dianggap sebuah kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan. Beberapa informan juga menyatakan bahwa menabung adalah pilihan ideal untuk menggapai tujuan, tetapi ketika dihadapkan dengan adanya program bantuan yang memiliki tingkat sejajar dengan menabung, membuat mereka memutuskan mengambil kesempatan untuk mendaftar program bantuan tersebut. Mereka juga mengatakan dana bantuan sebesar tiga puluh juta rupiah tersebut belum tentu bisa mereka kumpulkan dalam satu sampai tiga tahun. Hal ini seperti yang diketahui akan jenis pekerjaan masyarakat yaitu mayoritas buruh dengan penghasilan rata-rata di bawah satu juta lima ratus per bulan, membuat mereka yakin bahwa keputusan mengikuti program BSPS adalah keputusan yang tepat dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki rumah hunian sekalipun dalam kondisi swadaya terbatas.

### ***Sumber Daya pada Implementasi BSPS di Desa Sambigede dalam Teori Pilihan Rasional***

Dalam pandangan Coleman, sumber daya merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Di sisi lain, sumber daya merupakan setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yaitu segala potensi yang ada di alam yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk mencapai preferensinya. Sedangkan, sumber daya manusia yaitu kemampuan atau potensi yang ada pada diri aktor tersebut (Ritzer, 2004). Pada intinya, arti dari sumber daya dalam konteks ini adalah segala sesuatu atau segala potensi yang dapat dikontrol dan dikendalikan oleh aktor. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi dua wujud, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia memiliki kaitan erat dengan potensi penerima bantuan dalam menjalankan program BSPS. Hal tersebut secara otomatis juga berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan penerima bantuan dalam membuat rumah. Sedangkan, sumber daya alam dalam konteks penelitian ini, berkaitan dengan bahan bangunan yang dimiliki oleh penerima bantuan, baik yang didapatkannya melalui program BSPS maupun yang mereka miliki dalam bentuk swadaya pribadi sesuai dengan ketentuan program yang ditetapkan. Berdasarkan hasil paparan data yang telah disajikan, peneliti berhasil menghimpun dua jenis sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mengikuti dan mendaftar sebagai penerima bantuan BSPS, yaitu:

#### ***Sumber Daya Manusia Penerima Bantuan BSPS***

Sumber daya manusia yaitu kemampuan atau potensi yang ada pada diri aktor (Ritzer, 2004). Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya, bahwa potensi yang dimiliki aktor merupakan wujud dari potensi yang dimiliki para penerima bantuan BSPS. Potensi ini berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan para penerima BSPS dalam menjalankan program, khususnya keterampilan dalam membuat rumah. Namun, berdasarkan hasil penggalian data mayoritas masyarakat penerima bantuan masih belum memiliki kemampuan yang cukup dalam membangun rumah. Hal ini terbukti pada keengganan mereka untuk menjadi tukang bangunan dan justru membuat mereka untuk membayar jasa tukang dalam melaksanakan program BSPS. Seperti yang dilakukan oleh beberapa informan, yaitu Bapak Jepri, Bapak Alek, Bapak Edi, dan Bapak Adi yang memutuskan untuk menggunakan jasa tukang selama proses pengerjaan rumahnya. Hal tersebut mereka lakukan demi terselesainya target pembangunan rumah yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yaitu selama satu bulan pengerjaan.



Meskipun mereka harus mengeluarkan uang banyak, tetapi hal tersebut rela mereka lakukan agar tujuan atau keinginan untuk memiliki rumah hunian tercapai. Hal ini juga tergambar pada keluarga Bapak Nyonyong yang menggunakan jasa tukang dengan sistem borongan. Keputusan ini didasarkan pada anggapan penggunaan jasa tukang borongan dinilai lebih murah dibandingkan jasa tukang perorangan. Dari beberapa keterangan yang telah dihimpun peneliti terkait dengan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan BSPS, pada intinya apa yang penerima BSPS lakukan bukanlah tanpa tujuan. Keputusan untuk menggunakan jasa tukang dianggap rasional dikarenakan kurangnya keterampilan pada diri penerima bantuan dan pengejaran target waktu pembangunan. Jika mereka paksakan untuk tidak menggunakan jasa tukang, kemungkinan yang akan mereka hadapi yaitu tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah tepat waktu dan kemungkinan lainnya yaitu hasil pembangunan rumah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Jadi, meskipun harus mengeluarkan uang banyak sekalipun uang tersebut hasil hutang ke saudara, penggunaan jasa tukang tetap mereka prioritaskan demi kelancaran pelaksanaan program BSPS.

### *Sumber Daya Alam Penerima Bantuan BSPS*

Sumber daya alam yaitu segala potensi yang ada di alam yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk mencapai preferensinya (Ritzer, 2004). Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya, bahwa potensi yang dimiliki aktor merupakan wujud dari potensi yang dimiliki para penerima bantuan BSPS. Potensi ini berkaitan dengan jumlah bahan bangunan yang dimiliki penerima bantuan sebelum dan pada saat menjalankan program. Namun, berdasarkan hasil penggalian data, mayoritas masyarakat penerima bantuan masih belum memiliki swadaya bahan bangunan yang cukup dalam membangun rumah. Hal ini terbukti pada beberapa informan penelitian yang rela mengikuti program meskipun pada waktu itu hanya memiliki bahan bangunan terbatas. Seperti halnya pada informan Bapak Jepri, demi memanfaatkan program yang ia anggap belum tentu ada di kemudian hari, membuat keluarga ini yakin mengikuti program meskipun ia hanya memiliki uang dua juta dan beberapa swadaya seperti kayu dan besi yang bisa dibilang cukup terbatas. Terlebih lagi sebagian swadaya tersebut ia dapatkan dari bantuan orang tua dan hutang ke saudara terdekat. Hal ini juga tercermin pada keluarga Bapak Edi yang pada waktu itu hanya memiliki uang dua juta beserta bahan bangunan yang didapatkan dari bantuan saudara yaitu pasir satu rit dan batu bata dua ribu. Kedua informan tersebut menggambarkan bahwa keputusan mengikuti BSPS dianggap rasional sekalipun besar swadaya yang mereka miliki sangat terbatas. Kerasionalan tersebut didasarkan atas keinginan memiliki rumah baru agar lebih mandiri telah mendominasi pemikiran mereka sehingga menjadi tujuan yang harus dicapai sekalipun dengan berbagai upaya untuk mewujudkannya seperti hutang ke saudara terdekat.

### **Dampak Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman**

Pada kajian teori pilihan rasional ini, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional (Ritzer, 2004). Tetapi hal ini sama saja apakah aktor dapat bertindak dengan tepat berdasarkan preferensi keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Sekalipun preferensi yang yang diputuskan tersebut sesuai atau menyimpang dari cara-cara yang diamati. Di dalam teori ini, "pilihan, keyakinan, dan tindakan" adalah hal yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan rasional apabila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan dan keyakinan. Teori pilihan rasional memang memuatkan pandangan pada tujuan atau maksud aktor. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa teori ini mengakui adanya dua pemaksa utama yang membuat aktor melakukan tindakan. Dua pemaksa tersebut antara lain yaitu keterbatasan sumber daya dan tindakan lembaga sosial.

Adapun berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, dampak negatif yang dirasakan oleh para penerima bantuan pasca pelaksanaan program BSPS yaitu beban hutang.

Namun, jika berbicara tentang kerugian yang dialami dikarenakan hutang tersebut, sebagian informan memang sepakat menyatakan bahwa hutang adalah sebuah hal yang merugikan. Hal ini dikarenakan sebuah kondisi yang harusnya mereka tenang pasca pelaksanaan program, tetapi justru sebaliknya dikarenakan mereka harus bekerja keras untuk mengangsur hutang yang telah ia gunakan selama pembangunan. Di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa keputusan berhutang adalah keputusan yang dianggap rasional oleh mereka khususnya yang mempunyai swadaya terbatas, karena hanya dengan cara tersebutlah mereka bisa mengikuti dan menyelesaikan target program BSPS sekaligus mencapai apa yang sudah mereka inginkan yaitu memiliki rumah hunian sekalipun harus berhutang.

Peneliti telah berhasil memetakan alasan informan memutuskan hutang sebagai preferensi utama yang dianggap rasional. Pemetaan tersebut diklasifikasikan menjadi dua penyebab yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal hutang dalam konteks ini memiliki arti yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri masyarakat penerima BSPS. Sedangkan, penyebab eksternal hutang dalam konteks ini memiliki arti yaitu penyebab yang berasal dari luar diri masyarakat penerima BSPS. Penyebab internal keputusan berhutang didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mereka anggap rasional seperti: 1) besarnya keinginan untuk memiliki rumah, 2) keterbatasan swadaya, dan 3) membangun rumah di atas ketentuan dan saran dinas. Namun, di sisi lain juga terdapat penyebab eksternal keputusan berhutang didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mereka anggap rasional seperti: 1) kebijakan toko penyalur yang dirasa merugikan dan sistem penyamarataan jenis material bantuan oleh pendamping lapangan, 2) durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek.

Dari pemetaan kerasionalan pilihan masyarakat penerima BSPS dalam berhutang di atas, berikut penjelasan yang lebih detail terkait dengan penyebab internal keputusan berhutang pada masyarakat penerima BSPS antara lain:

### ***Besarnya Keinginan Masyarakat untuk Memiliki Rumah***

Berdasarkan hasil paparan data yang telah peneliti sajikan, terlihat bahwa mayoritas masyarakat yang mengikuti program BPS adalah masyarakat sudah berkeluarga dan yang belum memiliki rumah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan primer yang belum terpenuhi secara utuh dalam hidupnya. Keberadaan BPS dianggap sebuah peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum mereka dapatkan selama ini. Oleh sebab itu, terdapat beberapa pertimbangan yang dianggap rasional seperti tujuan mereka mengikuti BPS ini, antara lain: 1) memaksimalkan keberadaan bantuan dengan memanfaatkan peluang menjadi penerima BPS, 2) keinginan masyarakat untuk hidup mandiri, 3) keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hunian (tiga pertimbangan tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan rumusan pertama). Meskipun dengan swadaya atau tabungan yang terbatas, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan keputusan mereka dalam mengikuti program BPS sekalipun harus berhutang. Keputusan berhutang dianggap preferensi rasional yang harus diambil guna mewujudkan tujuan yang telah mereka rumuskan dalam mengikuti program BPS ini.

### ***Keterbatasan Sumber Daya Masyarakat Penerima Bantuan***

Dalam konteks implementasi program BPS di desa Sambigede cenderung dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki sumber daya atau swadaya terbatas. Memang tidak ada batasan terkait jumlah swadaya yang harus dimiliki oleh calon penerima BPS tersebut. Namun, dengan adanya swadaya yang cukup diharapkan tidak membuat masyarakat penerima bantuan mengalami kesulitan pada saat menjalankan program pembangunan rumah. Kesulitan tersebut masih dialami oleh masyarakat penerima bantuan di desa Sambigede. Bermodal keinginan untuk mendapat bantuan yang mendominasi, tidak diimbangi dengan kesiapan berswadaya yang memadai. Meskipun mereka sudah menyatakan kesanggupan dalam berswadaya, namun tidak bisa dipungkiri jika hasil dari penggalian data menyatakan bahwa beberapa masyarakat

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Hal tersebut dikarenakan minimnya tabungan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, baik tabungan dalam wujud uang maupun tabungan dalam wujud bahan bangunan. Alhasil dari minimnya tabungan tersebut membuat para masyarakat penerima bantuan mencari alternatif lain untuk menutupi kekurangan dana yang ada guna mengejar target pembangunan. Dalam pandangan Coleman, alternatif yang digunakan oleh penerima bantuan merupakan salah satu upaya aktor yang menutupi keterbatasan swadaya guna mencapai tujuan yang diharapkan. Alternatif yang diambil oleh masyarakat tersebut adalah berhutang. Beberapa masyarakat mengambil alternatif untuk berhutang tersebut kepada saudara terdekat dan atau bank. Hutang memang bukanlah hal yang asing untuk masyarakat Desa Sambigede. Dengan berhutang, mereka berharap target pembangunan rumahnya dapat terselesaikan secara maksimal dan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Secara spesifik hutang pun terjadi bukan untuk membeli kekurangan bahan bangunan saja, tetapi menurut beberapa informan, hutang tersebut diperuntukkan membayar jasa tukang dan atau kuli yang mereka gunakan. Mayoritas informan penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan yang menggunakan jasa tukang dan atau kuli selama proses pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan tersebut tidak memiliki keahlian yang cukup dalam hal pembangunan rumah. Beberapa dari mereka pun menyatakan bahwa anggaran terbesar dari pembangunan rumah, salah satunya berasal dari jasa tukang bangunan. Karena selain membayar jasa tukang tersebut, masyarakat penerima bantuan harus menyediakan rokok dan konsumsi bagi masing-masing tukang bangunan yang mereka gunakan jasanya. Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang menggunakan jasa tukang dengan sistem borongan lepas. Meskipun konsumsi dan rokok tidak ditanggung oleh masyarakat penerima bantuan tersebut, tetapi masyarakat tersebut tetap mengakui bahwa pengeluaran terbesar selama pembangunan rumah terdapat di jasa tukang borongan yang mereka gunakan.

Pada dasarnya, peristiwa ini telah sesuai dengan pandangan Coleman, di mana keterbatasan sumber daya yang dialami oleh penerima bantuan sebagai aktor dapat diselesaikan dengan upaya yang diputuskan melalui preferensi tertentu. Kesulitan karena keterbatasan sumber daya sudah teratasi melalui cara yang dianggap rasional oleh penerima bantuan. Meskipun penerima program sebagai aktor harus menanggung beban hutang pasca pelaksanaan program, tetapi hal tersebut dianggap preferensi terbaik dari pada tidak mengikuti program bantuan sama sekali dan yang pasti belum tentu akan ada program tersebut lagi di kemudian hari.

### ***Membangun Rumah di Atas Ketentuan dan Saran DPKPCK***

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya (bab hasil dan paparan data), terlihat bahwa terdapat saran yang diberikan oleh pihak Dinas DPKPCK, yaitu agar masyarakat membangun rumah dengan ukuran luas 6 x 6 meter atau 5 x 7 meter dengan tipe dua kamar tidur. Hal ini tidak lain ditujukan agar kesulitan yang dialami masyarakat tidak begitu besar dan dana bantuan yang diberikan dan dimanfaatkan secara maksimal. Namun, saran tersebut diabaikan oleh beberapa penerima bantuan dengan cara membangun rumah di atas saran yang diberikan oleh dinas DPKPCK. Seperti halnya yang terjadi pada informan Bapak Alek, ia membangun rumah dengan ukuran luas 6 x 9 meter dan tipe tiga kamar. Pun juga oleh Bapak Jepri yang membangun rumah dengan ukuran luas 6 x 7 meter dan tiga kamar tidur. Tujuan beberapa informan tersebut membangun rumah di atas ukuran saran dinas DPKPCK sekaligus dengan swadaya yang sangat terbatas yaitu tidak lain dikarenakan jumlah anggota keluarga atau anak yang mereka miliki. Bapak Jepri dan Bapak Alek memiliki dua orang anak, jadi dengan membangun rumah tipe tiga kamar tersebut memiliki tujuan yaitu satu kamar untuk dirinya, dan dua kamar lainnya untuk anak-anaknya. Keterbatasan swadaya bukanlah menjadi halangan bagi mereka untuk membangun rumah di atas saran dinas DPKPCK. Selama mereka memiliki tujuan dalam membangun tipe dan luas rumah yang masuk akal (meskipun di atas ketentuan), maka keputusan hutang yang

dilakukan, mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang rasional dan merupakan preferensi yang harus dipilih guna mencapai tujuan yang mereka harapkan.

Setelah mengetahui penjelasan detail terkait penyebab internal masyarakat penerima bantuan berhutang, berikut penjelasan lain terkait dengan penyebab eksternal keputusan berhutang pada masyarakat penerima BSPS antara lain:

### ***Kebijakan Toko Penyalur Bantuan dan Sistem Penyamarataan Jenis Material Bantuan oleh Pendamping Lapangan***

Keberadaan lembaga sosial juga dapat mendorong dan menghambat aktor untuk menentukan sebuah tindakan dalam pencapaian tujuan. Lembaga akan mengawasi tindakan yang dilakukan oleh aktor, dan menjatuhkan sanksi yang dapat mendorong atau menghambat aktor dalam mencapai tujuan tersebut. Lembaga sosial yang dimaksud dapat berupa aturan yang berasal dari lembaga formal, non-formal, maupun informal yang mengikat kehidupan seorang aktor. Wujud nyata lembaga tersebut antara lain aturan yang berasal dari lembaga keluarga, sekolah, keagamaan, hingga lembaga pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, program BSPS merupakan produk dari lembaga pemerintahan. Di mana, di dalam program tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana dan penerima BSPS itu sendiri. Memang kebijakan dari lembaga ini dapat menghambat dan mendorong para aktor/penerima bantuan dalam melakukan tindakan. Salah satu kebijakan lembaga pemerintah dalam program BSPS yang dapat mendorong aktor untuk mencapai tujuan adalah dengan tidak adanya batasan swadaya yang ditetapkan oleh program tersebut. Hal tersebut direspon positif oleh masyarakat penerima BSPS khususnya bagi masyarakat yang memiliki jumlah swadaya terbatas, karena mereka tidak terlalu mengkhawatirkan jumlah swadaya yang harus mereka miliki sebelum mengikuti program BSPS. Dengan demikian, peluang mereka untuk memperbaiki kualitas hunian dan pembuatan rumah baru akan semakin besar. Terlebih lagi persyaratan pendukung seperti persyaratan administratif yang mudah dijangkau oleh masyarakat pun juga menjadi salah satu pemaksa yang mendorong aktor untuk menentukan pilihan atau tindakan yang dianggap rasional.

Di sisi lain, adapun sistem pelaksanaan program yang justru menghambat seorang aktor dalam menentukan tindakan yaitu dan kebijakan toko penyalur dan sistem penyamarataan jenis material bantuan oleh pendamping lapangan serta durasi pembangunan rumah. Dari kondisi inilah yang justru menjadikan bentuk dorongan aktor untuk melakukan tindakan seperti berhutang sebagai bentuk reaksi dari adanya sistem pelaksanaan program tersebut. Penentuan toko penyalur dilakukan oleh pendamping lapangan dengan kriteria tertentu. Dengan ditetapkan toko penyalur sebagai pemasok kebutuhan bantuan khususnya pada bahan bangunan, membuat toko penyalur memegang otoritas penuh akan harga dan kuantitas barang yang digunakan sebagai wujud BSPS. Hal ini juga membuat toko penyalur memegang kendali dengan menciptakan sebuah kebijakan yang sempat disesalkan oleh para penerima BSPS. Berdasarkan hasil penggalan data, hak dan kuasa yang dimiliki oleh toko penyalur justru sebagian memberikan kebijakan yang memberatkan masyarakat penerima bantuan.

Menurut sudut pandang masyarakat penerima BSPS, kebijakan yang ditetapkan toko antara lain: pertama, kebijakan harga yang ditetapkan pada beberapa barang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasaran. Kedua, kebijakan pemotongan harga beberapa barang hingga mencapai 50% yang sengaja ditukarkan ke toko penyalur. Namun, tidaklah banyak yang dapat dilakukan oleh aktor/penerima bantuan selain menerimanya dengan lapang dada, meskipun di hati mereka tidak rela ada pemotongan harga tersebut. Bahkan akibat banyaknya barang yang ditukar ke toko, beberapa masyarakat penerima BSPS mengaku mengalami kerugian yang lumayan besar. Menurut keterangan salah seorang informan, Bapak Nyonyong, Ia sempat mengalkulasi kerugiannya yaitu sebesar kurang lebih dua juta rupiah. Kebijakan inilah yang sempat menghambat pelaksanaan pembangunan rumah yang merupakan

hasil pilihan rasional para aktor. Hambatan dirasakan ketika para aktor mengalami kesulitan di tengah pembangunan akibat kebijakan toko tersebut. Kebijakan toko telah berhasil memotong kuantitas bahan bangunan akibat proses penukaran barang justru membuat para aktor tidak berdaya.

Memang sempat terjadi kekecewaan, tetapi para aktor telah berpikir seperti tujuan yang telah dirumuskannya sejak awal. Sehingga membuat mereka memilih untuk diam dan melanjutkan proses pembangunannya meskipun harus menanggung rugi yang cukup besar. Keputusan diam pun didasarkan atas anggapan rasa syukur karena telah diberi kesempatan untuk mendapatkan program tersebut dan sedikit mengesampingkan masalah kebijakan yang dilakukan oleh toko penyalur. Meskipun risiko yang harus diambil adalah mereka harus memikul beban hutang yang semakin besar, tetapi secara umum mereka pun mengakui bahwa program BSPS sangatlah berharga bagi mereka. Hambatan tersebut semakin pudar ketika sebuah pemikiran mendominasi pola pikirnya. Pikiran tersebut yaitu “belum tentu jika tanpa program itu, mereka dapat membangun rumah di kemudian hari. Belum tentu juga uang tabungan mereka akan terkumpul di kemudian hari. Belum tentu juga program seperti itu ada kembali di kemudian hari, sedangkan kebutuhan rumah adalah kebutuhan primer yang harus bisa dipenuhi”. Pikiran-pikiran tersebutlah yang menjadi preferensi aktor untuk melakukan pertimbangan dan menentukan tindakan bahwa mengikuti program BPS adalah pilihan yang rasional sekalipun harus menghadapi pelaksanaan teknis yang dianggap merugikan oleh mereka.

Kemudian terkait dengan sistem penyamarataan jenis bantuan bahan material kepada beberapa masyarakat penerima bantuan. Sistem tersebut juga dianggap sebagai pemicu aktivitas penukaran bahan bangunan ke toko penyalur. Bapak Widarto selaku pendamping lapangan BPS dari pemerintah desa mengatakan bahwa aktivitas penukaran barang bangunan memang terjadi. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan jenis barang bantuan yang telah diterima karena keterbatasan jumlah dana yang mereka miliki. Kemudian pernyataan toko dan masyarakat bantuan terkait penyamarataan jenis material bangunan juga di respons oleh Bapak Widarto. Dia menjelaskan bahwa penyamarataan bahan bangunan tidak sepenuhnya benar. Pihak pendamping lapangan (dari desa dan dinas perumahan) telah menawarkan jenis barang apa saja yang akan diterima penerima bantuan nantinya. Tetapi memang untuk masyarakat yang memiliki jumlah swadaya uang terbatas cenderung memasrahkan jenis bahan material kepada pendamping lapangan. Pada waktu itu pihak pendamping lapangan memang hanya menawarkan menggunakan bahan batu bata atau batako, selebihnya pendamping lapangan yang menentukan jenis bahan material tersebut. Hal itu tentunya berdasarkan permintaan dan izin dari si penerima bantuan itu sendiri.

Dari keterangan tersebut, tidak bisa dipungkiri jika kebijakan toko dan sistem penyamarataan jenis material bangunan merupakan hal yang terjadi di tengah pelaksanaan program BPS. Oleh karena itu, sekalipun terdapat kaca mata atau alasan yang berbeda seperti yang diutarakan pemilik toko penyalur akan kebijakannya dan pendamping lapangan akan sistem penyamarataannya. Namun, hal tersebut tetaplah sebagai bentuk kendala yang dialami masyarakat penerima bantuan sehingga mereka memutuskan untuk mengambil jalan “berhutang” sebagai alternatif solusinya.

### ***Durasi Waktu Pembangunan yang Dirasa Cukup Pendek***

Dalam hal durasi pembangunan rumah memang di dasarkan pada hasil keputusan bersama masyarakat penerima bantuan di desa Sambigede. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara serentak di bulan Desember hingga akhir bulan Desember. Pada realitanya masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang mengalami kesulitan dalam mengejar target waktu tersebut. Seperti halnya diakui oleh informan Bapak Jepri dan Bapak Edi. Tetapi, sekalipun mereka sempat mengalami kesulitan, tetapi hal tersebut bukan menjadikan alasan mereka untuk menghentikan pembangunan. Mereka juga menyadari bahwa durasi tersebut merupakan

kesepakatan bersama pada awal pelaksanaan program dan merupakan aturan yang harus dipatuhi. Dari aturan tersebutlah yang membuat Bapak Edi dan beberapa penerima bantuan lainnya memutuskan untuk menggunakan jasa tukang lebih dari satu orang. Bahkan terdapat salah satu penerima bantuan yaitu Bapak Nyonyong yang menggunakan jasa tukang dengan sistem borongan. Hal ini tentunya mengeluarkan anggaran sendiri yang cukup besar sejumlah dua belas juta rupiah. Namun, menurut Bapak Nyonyong penggunaan jasa tukang sistem borongan dianggap lebih irit jika dibandingkan sistem perorangan. Selain itu, penggunaan sistem borongan juga dianggap tepat khususnya untuk mengejar target pembangunan rumah karena sudah ada kepastian kesanggupan penyelesaian pembangunan yang diberikan oleh tukang berdasarkan permintaan waktu yang diminta oleh penerima bantuan. Tujuan dari penggunaan jasa tukang ini selain karena para penerima bantuan belum memiliki kemampuan yang cukup dalam membangun rumah, adapun tujuan lain yaitu untuk mempercepat proses pembangunan rumah dan selesai sesuai batas waktu yang disepakati. Hutang dianggap satu-satunya cara menutup kekurangan tabungan para penerima bantuan dikarenakan mereka harus merogoh saku lebih dalam lagi untuk membayar jasa tukang.

Dari hasil paparan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dampak implementasi program BSPS di desa Sambigede, dapat ditarik kesimpulan menggunakan kaca mata teori pilihan rasional bahwa setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda dengan aktor yang lain. Terlebih lagi, setiap aktor memiliki sumber atau akses yang berbeda terhadap sumber daya lain. Semakin besar atau banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang aktor dalam mencapai tujuan yang sudah ia tetapkan. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah sumber daya yang dimiliki aktor, maka semakin kecil pula kesempatan aktor dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mengejar tujuan tertentu, aktor tentunya memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan tertentu. Pertimbangan tersebut menentukan lanjut atau tidaknya seorang aktor untuk melakukan tindakan yang sama dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dikarenakan aktor menyadari bahwa dengan adanya sumber daya yang terbatas maka dapat membuat aktor gagal dalam mewujudkan tujuannya, begitu pun sebaliknya. Jadi, pada intinya keterbatasan sumber daya menjadi hal penentu seorang aktor untuk melakukan sebuah tindakan yang pada dasarnya tidak lepas dari peluang aktor dalam meraih tujuan selanjutnya yang berharga.

Beberapa masyarakat menyatakan bahwa hutang merupakan salah satu hal yang dianggap negatif, tetapi di sisi lain mereka juga tidak memungkiri kenyataan bahwa tanpa hutang mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada awal pembahasan rumusan kedua penelitian bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan tujuan dibalik kerasionalan penerima bantuan untuk berhutang. Pertimbangan tersebut berasal dari dua penyebab yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Pada masing-masing penyebab itu pun juga mengandung sebuah kerasionalan lagi yang semakin mendukung keputusan penerima bantuan untuk berhutang.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan publik adalah tindakan yang saling berhubungan dan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kebijakan. Namun, pasca pelaksanaan kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Sambigede menimbulkan sebuah masalah khususnya bagi masyarakat yang memiliki swadaya terbatas. Banyak masyarakat yang memikul beban hutang pasca pelaksanaan program BSPS. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara tujuan program bantuan BSPS dengan realita hasil implementasi yang telah berjalan dari kacamata murni penerima bantuan BSPS khususnya penerima bantuan yang memiliki swadaya terbatas. Pada dasarnya menurut perspektif teori pilihan rasional, hasil penelitian ini secara umum merujuk pada sikap penerima bantuan/aktor terhadap keberadaan Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di desa Sambigede. Begitu besar tujuan atau keinginan yang ditetapkan oleh aktor melalui jembatan program BSPS ini tanpa mencoba melihat kemampuan swadaya yang dimilikinya. Tujuan tersebut antara lain: 1) memaksimalkan keberadaan bantuan dengan memanfaatkan peluang menjadi penerima BSPS, 2) keinginan masyarakat untuk hidup mandiri, 3) keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hunian. Dari tujuan tersebutlah mendominasi pemikiran aktor untuk memutuskan menjadi penerima BSPS meskipun dengan kondisi swadaya terbatas. Seiring dengan pelaksanaan program, para aktor sempat mengalami kesulitan yang memutuskan mereka untuk berhutang. Upaya atau tindakan ini dianggap rasional atau preferensi terbaik ketika mengalami beberapa kesulitan menjalankan program BSPS. Penyebab internal keputusan berhutang antara lain: 1) besarnya keinginan untuk memiliki rumah, 2) keterbatasan swadaya, dan 3) membangun rumah di atas ketentuan dan saran dinas DPKPCK. Namun, di sisi lain juga terdapat penyebab eksternal keputusan berhutang, seperti: 1) kebijakan toko penyalur dan sistem penyamarataan jenis material bangunan oleh pendamping lapangan yang dirasa merugikan, 2) durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek. Dari keputusan tersebutlah, yang membuat mereka tidak bisa memungkiri keadaan bahwasanya mereka harus menghadapi dampak negatif yaitu menanggung beban hutang pasca pelaksanaan program BSPS. Jadi, pada intinya penggunaan kalimat “*ati karep bondo cupep*” dianggap kalimat yang representatif dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti. Kalimat tersebut tidak lain menggambarkan keinginan yang begitu besar pada diri seorang penerima bantuan BSPS dalam memenuhi kebutuhan primernya hingga rela mengikuti program BSPS dengan kondisi swadaya terbatas yang berujung pada beban hutang pada masing-masing penerima bantuan pasca pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, S. M., Nugroho, K. S., & Rahmawati, R. (2015). *Evaluasi pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82%*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/018/07/16/1483/-persentasependuduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9,82-persen.html>
- Hariyani, T. (2018). Dampak implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekuivalensi*, 2(2), 77–99.
- Isabella, I., Sesar, J., & Amaliatulwalidain, A. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, I. (2009). Eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 191–199.
- Purnawati, P. (2014). *Penelitian proses formulasi kebijakan publik (studi tentang penyusunan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung.
- Qomaria, A. (2015). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–7.
- Ritzer, G. (2004). *Teori sosiologi modern*.
- Rusli, Z., & Inggriani, I. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya*. Riau University.
- Togatorop, S. (2014). *Dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Parbuluan Kabupaten dari Tahun 2012*. UNIMED.
- Upe, A. (2010). *Tradisi aliran dalam sosiologi: Dari filosofi positivistik ke post positivistik*. Rajawali Pers.

**Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)**

April, 2022, Vol. 5, No. 1, hal. 30-45

Wibowo, D. R., & Santoso, R. S. (2018). Evaluasi dampak sosial bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen periode Tahun 2010-2015. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 315–332.

Yulifar, L. (2016). *Sosiologi dan Antropologi Pembangunan*.